



## INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MEMBANGUN KEKUATAN MARITIM NASIONAL

R. Prabowo Herbanu, Dwi Soediantono

*Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut*

*Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230*

*prabowo.herbanu@mail.tnial.mil.id*

*Abstract* Sovereignty is considered an important element of the state system. Sovereignty is an exclusive right in exercising the highest political authority. However, currently we are in a period of strategic limitations, where our sovereignty is disrupted due to the competitive advantage of our defense industry which has not become a priority. We are facing increasing global threats, marked by an international rules-based order that is dominated by the interests of certain countries, thus creating a more complex and unstable security environment. Responding to this, of course, it is very important Republic of Indonesia to make improvements and increase the superiority of national defense, especially in the maritime sector. This is because Indonesia is a country that has a large ocean and it is an obligation for all Indonesian citizens to always maintain its sovereignty. The method in this study uses secondary data from various literature sources to answer the efforts that can be made to build national defense in the maritime sector. The results of this study explain that Indonesia's maritime defense can be built through the intensification of various matters relating to the fulfillment of elements of maritime power. Of course, the Indonesian government and various related parties can consider this as soon as possible.

**Keywords:** *Defense, Maritime, Indonesia*

### PENDAHULUAN

Negara di dunia tentunya sangat memperhatikan kedaulatan yang mereka miliki. Kedaulatan dianggap sebagai elemen penting dari sistem negara. Istilah kedaulatan berasal dari kata Latin *superanus* yang berarti tertinggi. Oleh karena itu, kedaulatan menunjukkan kekuasaan tertinggi negara. Faktanya, teori modern tentang sistem negara hanya disempurnakan ketika konsep kedaulatan diperkenalkan ke dalamnya. Jean Bodin, seorang penulis Prancis, adalah orang pertama yang merumuskan konsep kedaulatan secara sistematis. Walaupun Aristoteles pada zaman dahulu juga pernah berbicara tentang kekuasaan tertinggi yang terletak di badan-badan yang berbeda menurut bentuk pemerintahannya, tetapi ia tidak memberikan gagasan tentang kedaulatan karena menurutnya kekuasaan penguasa atau badan penguasa dibatasi oleh undang-undang yang orang lain di atas mereka (Dar & Sayed, 2017).

Kedaulatan menjadi sebuah hak eksklusif untuk menjalankan otoritas politik tertinggi (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) atas tindakan dan peristiwa dalam suatu wilayah. Karena itu adalah hak eksklusif, itu berarti tidak ada negara lain yang dapat memiliki otoritas politik formal di dalam Negara itu. Oleh karena itu, kedaulatan erat kaitannya dengan konsep kemerdekaan politik (KKP, 2019). Kedaulatan telah menjadi terkait erat dengan perdebatan tentang kekuasaan, wilayah dan status internasional, dan secara umum telah diakui untuk memberikan keamanan internal dalam tatanan yang memerangi anarki. Seringkali satu-satunya sumber daya yang ditolak kelompok tersebut adalah hubungan internasional, legitimasi eksternal, dan integrasi ekonomi regional.

Namun pada hari ini, kita muncul dalam sebuah periode atrofi strategis yang menyadari bahwa kedaulatan kita mulai terganggu akibat berbagai manuver yang dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Seluruh wilayah di dunia sedang berada pada ancaman dari tidak stabilnya dinamika perpolitikan global yang berpotensi memberikan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara, sehingga menjadi hal yang penting untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kompleks dan stabil daripada sebelumnya yang pernah dialami oleh seluruh negara dan Kawasan (Strategi Pertahanan Nasional Amerika, 2018). Gangguan yang terjadi ini kemudian menimbulkan berbagai upaya penguatan strategi pertahanan nasional secara besar dan kuat. Pengerahan berbagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia telah dilakukan oleh negara, salah satunya kedaulatan atas wilayah perairan dan laut.

Kita perlu menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua memiliki posisi geografis yang unik. Hal ini menuntut Indonesia untuk menyusun strategi posisinya dengan hati-hati. Posisi unik ini menempatkan Indonesia sebagai pusat di antara sepuluh negara tetangga yang berbatasan laut dan darat. Laut teritorial Indonesia penting bagi rute perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan. Sebagai negara dengan berbagai kepulauan yang terbentang dan negara dengan laut yang sangat luas, Indonesia dapat berkomitmen untuk menjaga keamanan dalam negeri, termasuk keamanan maritim sebagai landasan untuk memajukan kepentingan Indonesia sebagai Poros Maritim Global (Global Maritime Fulcrum (GMF)). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dengan seksama sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan Indonesia.

Dalam hubungan internasional, Indonesia mengutamakan kebijakan hubungan luar negeri yang bebas aktif serta dilandasi oleh semangat perdamaian, kemerdekaan, dan kedaulatan. Indonesia melihat negara tetangganya sebagai negara sahabat yang bekerja sama untuk menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan. Kerjasama regional di kawasan menjadi faktor penting bagi Indonesia dalam penyelesaian sengketa dan mempromosikan perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi PBB. Indonesia akan terus membuat kemajuan yang signifikan dalam membantu memecahkan permasalahan yang ada dan berusaha untuk menjaga kedaulatan nasional khususnya di bidang maritim. Area ini merupakan area yang luas dengan potensi yang besar jika di kelola dengan efektif dan efisien oleh pemerintah dan segenap warga negara. Perairan Indonesia yang memiliki skala besar mendesak pemerintah untuk membangun industri yang lebih kuat dan lebih andal dalam melindungi kedaulatan Indonesia.

Pertahanan negara Indonesia di bidang maritim menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Selain menegakkan kedaulatan dan kewibawaan negara di mata dunia, industri pertahanan yang dibangun dapat menjadi sebuah peluang besar dalam meningkatkan perekonomian negara dengan mendatangkan devisa yang besar. Beberapa kajian telah dilakukan oleh para akademisi untuk membahas mengenai potensi ini. Hal ini kemudian menjadikan motivasi penulis untuk membahas pentingnya pembangunan industri pertahanan di bidang maritim dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus dapat meningkatkan perekonomian negara melalui perolehan devisa negara.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan, seperti buku, artikel penelitian, jurnal ilmiah, dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan pertahanan dan sistem pertahanan maritim dunia dan Indonesia pada khususnya. Data sekunder bersumber dari kajian literatur terkait dalam membuat kerangka teoritis dan pembahasan penelitian.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan konseptual tentang Sistem Informasi Akuntansi, yang memiliki fokus seperti berikut:

1. Memahami kondisi laut Indonesia sebagai modal dalam membangun kualitas kekuatan pertahanan maritim
2. Mempelajari peran pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam upaya menjadikan kekuatan pertahanan maritim yang kuat dan sebagai Poros Maritim Dunia dalam era digitalisasi.
3. Mempelajari dan memeriksa apa saja hal yang perlu diperhatikan agar Indonesia dapat meningkatkan kualitas kekuatan pertahanan maritim dunia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah dan Karakteristik Pertahanan Maritim

Konsep pertahanan strategis wilayah maritim era klasik didasarkan pada kerangka politik-strategis dan teknologi pada periode yang menjadi dasar historisnya dan waktu di mana konsep tersebut dirumuskan. Konsep-konsep tersebut juga mencerminkan kepentingan nasional dan kemungkinan-kemungkinan penyusunan rumusannya. Bagi Alfred T. Mahan, laut merupakan bentuk perjalanan cerita pertahanan negara yang luar biasa, karena sifat wilayahnya yang terbuka untuk semua sehingga memungkinkan pergerakan bebas bagi kapal yang bermuatan manusia dan barang. Banyak ahli yang mencatat bahwa sejarah kekuatan maritim menunjukkan dampak besar transportasi laut terhadap perdagangan, kekayaan, dan kekuatan bangsa, sekaligus mengungkapkan bagaimana perselisihan dan persaingan di laut sering berujung pada konflik bersenjata. Jadi,

menurut Mahan pengendalian laut adalah faktor utama yang diperhatikan oleh seluruh negara dalam sejarah dunia (Mahan, 1687).

Mahan merumuskan terdapat enam karakter yang merupakan persyaratan bagi sebuah negara dalam mengembangkan kekuatan laut. Keenam karakter tersebut adalah kedudukan geografis, bentuk tanah dan pantai, luasnya wilayah, jumlah penduduk yang memanfaatkan laut, karakter penduduknya serta karakter pemerintah termasuk lembaga-lembaga di dalamnya.

Namun lebih jauh konsepsi dari Mahan tidak dapat mendefinisikan konsep kekuatan laut secara tepat bagi semua negara. Terkadang di berbagai negara menyebutnya sebagai kemampuan kekuatan militer dalam ekspresi angkatan lautnya untuk mengendalikan laut, bahkan menggunakannya hanya sebatas sebagai rangkaian kegiatan maritim komersial (Crowl, 1986). Padahal jika kita memandang lebih jauh, hal yang dapat kita ambil dan mendefinisikannya sendiri bahwa kekuatan laut diukur sebagai kemampuan suatu negara untuk mengeksploitasi atau mempengaruhi berbagai kegiatan yang terkait dengan laut dalam domain politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan militer. Kekuatan laut ini jadi tidak hanya sebatas pada kekuatan angkatan laut sebagai skuadron dan komponen militer yang merupakan bagian dari kekuatan laut.

Globalisasi dan kekuatan laut di era yang modern saat ini saling terkait erat. Konsepsi pertahanan, perdagangan, dan politik saling terkait, hingga pada akhirnya bangsa-bangsa terikat oleh kepentingan mereka sedemikian rupa sehingga keseluruhannya membentuk sistem yang diartikulasikan sendiri dalam menjaga kekuatan lautnya (Silva, 2017). Sistem inilah yang disebut sebagai dampak globalisasi militer di era saat ini. Fenomena ini secara dramatis meningkatkan arus informasi dan transaksi keuangan dan perdagangan, sekaligus meningkatkan efek yang saling ketergantungan antar negara. Pelaksanaan dengan konsekuensi langsung pada arus perdagangan dunia, yang pada gilirannya mendorong perkembangan pelayaran yang luar biasa serta membangun kekuatan militer yang luar biasa juga (Silva, 2007).

#### **Indonesia dan Pertahanan Lautnya**

Pembahasan terhadap kedaulatan bagian laut Indonesia telah memberikan banyak kajian umum tentang konsep kekuatan laut dan pengembangan sektor maritim Indonesia. Banyak kajian yang memiliki tujuan untuk mengkaji potensi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer laut yang kuat dan menjadi negara “sea power”. Namun saat ini, melalui berbagai kajian bidang ekonomi dan politik, terungkap bahwa Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan potensi kelautan yang dimilikinya. Sumber daya kelautan cukup melimpah di Indonesia, namun yang dimanfaatkan kurang dari 10 persen. Tercatat bahwa sektor maritim hanya memberikan kontribusi 11,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika dilihat dari sisi ketahanan pangan dalam konteks perikanan, Indonesia kini menghadapi tiga tantangan besar, yaitu illegal fishing, over-fishing, dan keterbatasan dana. Diperkirakan hal ini menjadikan Indonesia menderita kerugian sebesar \$ 24,2 miliar dari penangkapan ikan ilegal setiap tahun, dengan lebih dari 5.400 kapal penangkap ikan asing saat ini menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, serta kehilangan sekitar 5 juta ton sumber daya ikan dari penangkapan ikan yang berlebihan (Xue & Xu, 2016).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk bergerak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan maritim yang kuat. Salah satu contohnya adalah kata-kata Poros Maritim Global atau Global Maritime Fulcrum (GMF) yang merupakan istilah utama yang kerap diungkapkan Presiden Jokowi saat menjabarkan program visi dan misinya pada masa kampanye pemilihan presiden dan saat dilantik sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia. Presiden Jokowi melihat bahwa isu kelautan telah lama diulas dan dibahas dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga ia memanfaatkan momentum ini sebagai cara untuk mewujudkan kekuatan tersebut (Saragih et al, 2018).

Strategi untuk menggaungkan “sea power” kemudian menekankan pada empat bidang diplomasi, yaitu menonjolkan identitas samudera Indonesia dalam hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, meningkatkan citra internasional Indonesia melalui pelaksanaan diplomasi “medium power”, memperluas kehadiran Indonesia di kawasan India dan Samudra Pasifik, dan memperkuat diplomasi publik Indonesia (Marsetio, 2017). Strategi “sea power” ini didasarkan pada pembangunan nasional dan bertujuan untuk mengintegrasikan target pembangunan dalam negeri dan politik luar negeri dalam upayanya membangun Indonesia menjadi kekuatan menengah. Terlebih lagi, pergerakan kekuatan maritim saat ini sedang berada pada kawasan Indo Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai arus utama dengan cakupan wilayah laut yang luas.

#### **Mewujudkan Visi Membangun Poros Maritim Dunia**

Jika kita ingin mewujudkan visi dalam membangun pertahanan laut yang kuat, maka kita harus belajar banyak dari berbagai negara yang menerapkan hal serupa, seperti contohnya China. Konseptualisasi China

tentang kekuatan maritim mencakup gagasan tentang kekuasaan dan kontrol ketat dari pemerintah. China tidak akan menjadi kekuatan maritim sampai ia dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan, hak, dan kepentingan maritimnya, serta menghadapi apa yang disebutnya sebagai ancaman penahanan dari laut. Visi China tentang kekuatan maritim tak terhindarkan mengarah pada penilaian bahwa ia membutuhkan kekuatan pertahanan laut yang kuat dan sebuah angkatan laut dengan kekuatan penegakan hukum maritim yang maju. China dalam mewujudkan hal ini tidak memulai membangun kekuatan maritim yang setara dengan “selembar kertas kosong”. Dalam beberapa tahun ini manuver China yang bergerak dalam memiliki angkatan laut terkuat kedua di dunia. China sudah menjadi pemimpin dunia dalam pembuatan kapal, dan memiliki industri perikanan terbesar di dunia. Laut pedagangnya menempati urutan pertama atau kedua dalam hal jumlah kapal yang dimiliki warga. Ini sudah memiliki jumlah kapal penjaga pantai terbesar di dunia (McDevitt, 2016).

Tidak hanya China, kekuatan dunia terbesar lainnya yaitu Amerika Serikat juga ikut perlombaan dalam upaya mewujudkan negara maritim terkuat di dunia. Amerika Serikat menjadi negara yang turut serta memperhatikan kekuatan maritim. Keamanan dan kemakmuran pertahanan Amerika Sebagian besar bergantung pada ketahanan laut. Sejak akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat telah membangun, memimpin, dan memajukan sistem internasional berbasis aturan melalui komitmen bersama dengan sekutu dan mitranya. Pasukan Angkatan Laut AS telah menjamin keamanan sistem militer mereka. Akses bebas dan terbuka ke lautan dunia telah mendorong era kekayaan dan perdamaian yang luar biasa bagi banyak negara. Terlebih lagi, saat ini era perkembangan teknologi yang signifikan dan modernisasi militer yang agresif telah dilancarkan oleh Amerika akibat pesaing mereka berupaya untuk mengikis keunggulan militer yang telah dibangun (US Media Defense, 2020).

Lalu apakah Indonesia dapat turut serta membangun kekuatan dan industri pertahanan yang kuat? Tentu saja bisa. Ada beberapa hal yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Pertama kita harus mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Mahan menganggap bahwa elemen utama yang mempengaruhi kekuatan laut suatu negara adalah letak geografisnya, ukuran pantainya, dan jumlah daerah yang cocok untuk dibangun pangkalan atau pelabuhan yang memadai. Selain itu juga perlu diperhatikan elemen lainnya seperti jumlah penduduknya dan kecenderungan penduduknya untuk kegiatan yang berhubungan dengan laut, dan kemampuan pemerintahnya untuk menghasilkan kebijakan yang baik.

Lebih lanjut Erik Grove (1990) telah menyusun pembaharuan elemen-elemen dari Mahan dengan membagginya menjadi elemen-elemen orde pertama yang berisikan kekuatan ekonomi dan kapasitas teknologi, serta budaya sosial-politik. Lanjut pada elemen orde kedua yaitu posisi geografis, ketergantungan pada perdagangan maritim, dan sumber daya laut serta kebijakan dan persepsi pemerintah. Hal ini menjadikan terciptanya sebuah virtuous circle dimana kekuatan ekonomi dan kapasitas teknologi suatu negara mendorong peningkatan kekuatan lautnya sehingga pada gilirannya dapat berkontribusi untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan kapasitas teknologi negara tersebut.

Berbicara soal geografis, tentunya hal yang kita ketahui bahwa Indonesia telah memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, untuk keterlibatan penduduk dalam negara yang berperan dalam menjaga kelautan perlu untuk kita pahami lebih lanjut. Tanggung jawab untuk menjamin stabilitas dan keamanan di perairan Indonesia merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dengan membawa tantangan dan dinamika yang kompleks. TNI AL memiliki tugas yang saat ini semakin mengemuka, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjadikan sektor maritim sebagai prioritas dalam pembangunan nasional atau menjadi Poros Maritim Dunia. Keberhasilan TNI AL dalam mewujudkan keamanan maritim di Indonesia sangat menentukan arah pembangunan pertahanan maritim di Indonesia (Suhirwan & Prakoso, 2019).

Di bidang sistem pertahanan, pertahanan Indonesia didasarkan pada rencana strategis pertahanan terpadu yang komprehensif untuk mencapai tujuan nasional (Kementerian Pertahanan, 2015). Ini adalah sistem yang memenuhi tanggung jawab semua warga negara dan aparat negara lainnya. Kewajiban setiap warga negara didasarkan pada patriotisme untuk tujuan bersama dalam mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran nasional, termasuk kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan komitmen pertahanan negara. Struktur personil pertahanan harus sesuai dengan maksud dan tujuan negara. Hal terpenting yang harus dibangun sebagai visi pertahanan nasional adalah menguatkan struktur militer agar mengetahui bagaimana upaya melindungi negara. Inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi setiap warga negara untuk memahami kegiatan bernegara dan prinsip-prinsip nasional dalam perlindungan kedaulatan wilayah negara.

Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi dan sistem informasi pertahanan mulai dikendalikan oleh perkembangan perusahaan komunikasi terpadu untuk secara perlahan dapat digunakan secara berkelanjutan dan akurat menggunakan sistem informasi keamanan nasional berbasis pada satelit dalam pengelolaan

manajemen pertahanan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2008). Kemajuan teknologi dicapai melalui kerjasama dalam pengembangan produk industri material asing, termasuk penelitian dan pengembangan dan teknologi informasi, serta perusahaan penelitian dan pengembangan. Pembahasan yang mengarah pada penguatan industri keamanan nasional, khususnya produk mineral dapat dijadikan sebagai potensi dalam pembangunan pertahanan nasional.

Namun tentunya setiap aspek yang menjadi elemen penilaian kelayakan tersebut harus secara bertahap untuk dikaji dan dianalisis secara efektif agar menciptakan kondisi terbaik dari pertahanan Indonesia. Peningkatan strategi berkelanjutan perlu untuk dilakukan ketika berbicara membangun industri pertahanan negara di bidang maritim. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan visi Poros Maritim Global tersebut, salah satunya perbaikan serta penggiatan pembangunan infrastruktur laut yang berkelanjutan. Infrastruktur dan konektivitas di area laut menjadi suatu hal yang sangat krusial. Tren kenaikan permintaan barang pokok hingga pertahanan dunia lainnya akibat peningkatan konflik regional atau peningkatan PDB negara lain dapat meningkatkan ekspor ke seluruh dunia serta mempengaruhi keseimbangan harga dunia. Perubahan-perubahan ini kemudian meningkatkan keuntungan industri pertahanan. Saat ini dengan adanya konsep tol laut tentu dapat menjawab permasalahan utama transportasi laut terkait dengan ketidakseimbangan volume angkutan barang antara wilayah barat dan timur Indonesia. Konsep ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mencegah berlayarnya kapal-kapal kosong dari satu tempat ke tempat lain dan diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi barang yang efisien dan terintegrasi.

Konsep ini dapat menjawab serta mematahkan opini terkait mahalnya biaya logistik Indonesia menjadi beban bagi penyedia jasa logistik, yang juga berimbas pada perusahaan manufaktur. Biaya transportasi timbul dari proses penyediaan bahan baku hingga proses paling hilir dari rantai pasok, pengiriman barang jadi ke konsumen. Inefisiensi dan keterbatasan fasilitas dalam kegiatan pelabuhan menyebabkan banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan (Saragih et.al, 2018). Tentunya dengan penggiatan infrastruktur laut nantinya dapat menjadi jalan untuk menguatkan potensi penjagaan wilayah laut Indonesia melalui lalu lintas transportasi perdagangan. Selain itu, hal ini juga berimplikasi terhadap perekonomian negara di bidang ekspor impor.

Selain itu juga, TNI Angkatan Laut diberikan kewenangan dalam menempati posisi dan porsi yang strategis untuk mengupayakan implementasi yang optimal dari visi maritim Indonesia. Pemerintah perlu untuk memastikan agar TNI AL dapat beroperasi dengan dukungan peralatan Alutsista yang canggih sehingga dapat mempercepat pengawalan pemerintah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran kepada negara lain dan mengembangkan pelaksanaan diplomasi di bidang angkatan laut secara efektif. Pemerintah dan angkatan laut dapat melakukan beberapa upaya, antara lain modernisasi, pembangunan, dan pengerahan angkatan laut. Dinamika yang berkembang juga perlu menjadi respon bagi Indonesia dalam mengelola pencapaian visi maritim dunia.

## KESIMPULAN

Mewujudkan kekuatan pertahanan maritim suatu negara bukan hal yang mudah untuk dikesampingkan, utamanya bagi Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah laut yang luas. Pertahanan di area laut menjadi suatu hal yang penting untuk menjaga kedaulatan wilayah dan rakyat Indonesia di mata dunia. Pembangunan industri pertahanan dalam menjaga kedaulatan wilayah kemaritiman Indonesia sangat penting untuk didukung melalui berbagai upaya pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya visi menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Membangun berbagai infrastruktur laut hingga pembenahan SDM yang berkaitan dengan kelautan dapat menjadi kunci untuk membangun kekuatan pertahanan maritim Indonesia yang berkelanjutan.

## PENUTUP

Dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia, dibutuhkan peran dari TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alut sista TNI Angkatan Laut yang sebagian diproduksi di negara lain ke depan harus mulai bisa diproduksi oleh industri pertahanan Indonesia. Dengan cara inilah Indonesia diharapkan mampu menandingi kekuatan militer negara lain di kawasan Asia. Selain itu, dengan perkembangan industri pertahanan nantinya akan memberikan kontribusi devisa kepada negara dari pesanan alut sista oleh negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, M. A., & Soediantono, D. (2022). Peran Mediasi Kaizen dalam Hubungan antara Total Quality Management dan Kinerja Organisasi Industri Pertahanan . *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(4), 1 - 8. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i4.299>
- CNA. (2016, June). Becoming a Great Maritime Power: A Chinese Dream. Diakses dari <https://www.cna.org/news/events/china-and-maritime-power#:~:text=In%20November%202012%2C%20then%20President,strong%20or%20great%20maritim e%20power>. Diakses pada 20 Februari 2022
- Febrianto, T., & Soediantono, D. (2022). Enterprise Resource Planning (ERP) and Implementation Suggestion to the Defense Industry: A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 1 - 16. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i3.278>
- Harjo Susmoro, Haris Djoko Nugroho dan Yanuar Handwiono, “Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI-Negara Tetangga,” Jakarta: Pushidrosal, 2019.
- Harrison, Kevin & Boyd, Tony. (2018). The state and sovereignty. 10.7765/9781526137951.00005. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Sovereignty and Jurisdiction. E-Library KKP.go.id
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Indonesian Defence White Paper 2015. Jakarta: Kemenhan RI
- Kurc, C. et al. (2020). Defence Industries in the 21st Century: A Comparative Analysis. PricewaterhouseCoopers Global Aerospace and Defence Leader.
- Malinda, A., & Soediantono, D. (2022). Benefits of Implementing ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems and Implementation Suggestion in the Defense Industry: A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(2), 35 - 47. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i2.274>
- Miyagiwa, K. (1991). Oligopoly and Discriminatory Government Procurement Policy. *American Economic Review*, 81(5). 1320-1328.
- Mutaqiem, A., & Soediantono, D. (2022). Literature Review of Total Productive Maintenance (TPM) and Recommendations for Application in the Defense Industry. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(2), 48 - 60. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i2.275>
- Ngelyaratan, D., & Soediantono, D. (2022). Customer Relationship Management (CRM) and Recommendation for Implementation in the Defense Industry: A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 17 - 34. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i3.279>
- NAVY. (2020). Advantage at Sea: Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power. USA Media Defense
- Phelan, G. R. (1954). Sea Power and Strategies for The Control Of The Seas. *Naval War College Review*, 6(10).
- Permana , A. I., & Soediantono, D. (2022). The Role of Eco Supply Chain on Environment and Operational Performance of Indonesian Defense Industry. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 73 - 84. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i3.284>
- Saragih, H. et al. (2018). Indonesian National Power to Achieve the Global Maritime Fulcrum. 10.2991/amca-18.2018.14.
- Sugianto, S., & Soediantono, D. (2022). Literature Review of ISO 26000 Corporate Social Responsibility (CSR) and Implementation Recommendations to the Defense Industries. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(2), 73 - 87. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i2.276>
- Silva, A. (2017). The Enabling Power of the Oceans. *Contexto Internacional*. 39. 10.1590/s0102-8529.2017390200002.
- Soewarso, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Keamanan Matra Laut, Jakarta, 1986.
- Suhirwan, et al. (2021). National Defense Strategy. CV. Aksara Global Akademia
- Victoria, A. (2019). Maritime Power. 10.13140/RG.2.2.24595.22566.
- Xue, S. & Xu, L. (2016). Indonesia's 'Sea Power' Strategy and Maritime Cooperation with China. China Academic Journal Publishing House.